

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

P. Ayu Ratna Dewi¹
Ni Putu Sri Harta Mimba²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: ayuna.ratna1807@gmail.com/telp. +62 81 239 612 007

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penerapan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya, berperan cukup penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar dengan jumlah SKPD sebanyak 34 unit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang operator SIPKD. Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Kata kunci: efektivitas, penerapan SIPKD, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

The implementation of information systems, particularly in government agencies, have a considerable role in generating quality financial statements. The government is trying to realize the excellent service to the community by building information technology in finance or accounting in relation to the financial management area. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the Financial Management Information System (SIPKD) and its influence on the quality of financial reporting in the City of Denpasar. This research was conducted at Regional Working Units (SKPD) in the Denpasar City Government with the amount as much as 34 units. The sample used in this study were as many as 44 people SIPKD operator. Quantitative analysis techniques and simple linear regression analysis is used as a data analysis technique. The analysis shows the effectiveness SIPKD in Denpasar city government including the Effective criteria and effective implementation of SIPKD significant effect on the quality of financial reporting in the City of Denpasar.

Keywords: effectiveness, implementation of SIPKD, quality of financial statements

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi, pebisnis, profesional

maupun pada kalangan birokrasi. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam lampiran II dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (www.djkd.kemendagri.go.id).

Pemerintah Kota Denpasar adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak pertengahan tahun 2010 dengan tahap penyesuaian yang sebelumnya sudah lebih

dahulu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk keseragaman pengelolaan keuangan daerah maka SIMDA digantikan menjadi SIPKD. Setelah tahap penyesuaian penerapan SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar baru digunakan pada awal bulan Januari 2011 dan diterapkan oleh 34 SKPD di Pemerintah Kota Denpasar. Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/*output* dan relevansi. Diharapkan dengan efektifnya penerapan SIPKD maka kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan opini BPK pada tanggal 25 Mei 2012 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2011 mendapat opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 06.A/BPK.DPS/05/2012. Selanjutnya opini BPK pada tanggal 30 Mei 2013 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2012 mengalami peningkatan opini yaitu dari opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai LHP Nomor 04.A/LHP/XIX.DPS/05/2013. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar (Atyanta, 2011). Hal ini menjadi suatu kemajuan akan kinerja instansi di Pemerintah Kota

Denpasar karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Indriasari (2008), Harifan (2009) dan Yosefrinaldi (2013), menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Penelitian Fikri (2011) menyatakan bahwa SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Delanno (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai informasi dari pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Ratifah (2012) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Winidyaningrum (2010) menunjukkan bahwa selain kapasitas sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana tingkat efektivitas SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar serta untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Efektivitas Penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar dengan jumlah SKPD sebanyak 34 unit SKPD pada Pemerintahan Kota Denpasar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang operator SIPKD. Obyek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Efektivitas diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama (Livari, 1994). Ramezan (2009) yang menyebutkan efektivitas suatu hal mengenai hasil, sebab dan akibat serta merupakan sinonim untuk sukses karena menjadi sarana yang efektif untuk mencapai hasil dan perencanaan awal. Menurut Handoko (2009) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.

Tingkat efektivitas penerapan SIPKD ini diukur menggunakan 5 indikator (Bodnar, 2000) diantaranya keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu,

ketelitian, variasi laporan atau *output* dan relevansi sistem. Kemudian akan diperhitungkan menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis data dengan melakukan prosedur perhitungan tertentu sehubungan dengan penilaian terhadap efektivitas penerapan SIPKD.

Menurut Trisanthi (2011) persentase efektivitas penerapan SIPKD sebagai pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Jawaban sangat positif mempunyai skor 4 (empat)
- b) Jawaban positif mempunyai skor 3 (tiga)
- c) Jawaban negatif mempunyai skor 2 (dua)
- d) Jawaban sangat negatif mempunyai skor 1 (satu)

Prosedur perhitungan persentase efektivitas penerapan SIPKD berdasarkan jawaban dari responden dapat dijelaskan sebagai berikut (Trisanthi, 2011).

1. Menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah yang mungkin dicapai dari kuesioner yang diajukan.
2. Menentukan besarnya range skor nilai berdasarkan seluruh total skor nilai tertinggi yang mungkin dicapai dengan total skor nilai terendah yang mungkin dicapai.
3. Menentukan besarnya interval nilai berdasarkan perbandingan antara *range* skor nilai dengan jumlah kriteria nilai yang diperlukan. Terdapat empat kriteria, yaitu:
 - (i) Kriteria Sangat Efektif (KSE)
 - (ii) Kriteria Efektif (KE)
 - (iii) Kriteria Kurang Efektif (KKE)

(iv) Kriteria Tidak Efektif (KTE)

Rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval nilai } c = \frac{(a-b)}{k} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- c = interval nilai
- a = skor tertinggi
- b = skor terendah
- k = konstanta = 4

4. Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan total skor nilai yang diperoleh masing-masing unsur dengan formulasinya sebagai berikut:

$$(i) \quad b + 3c < KSE < a \dots\dots\dots(2)$$

$$(ii) \quad b + 2c < KE < b + 3c \dots\dots\dots(3)$$

$$(iii) \quad b + c < KKE < b + 2c \dots\dots\dots(4)$$

$$(iv) \quad b < KTE < b + c \dots\dots\dots(5)$$

5. Menentukan presentase terhadap keseluruhan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dan menentukan penilaian efektivitas penerapan SIPKD sebagai pengolahan data dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total skor responden}}{\text{Total skor tertinggi yang mungkin dicapai}} \times 100 \dots\dots(6)$$

Pengumpulan data selanjutnya untuk mengetahui pengaruh penerapan efektivitas SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar menggunakan kuesioner dan observasi nonpartisipan.

Laporan keuangan pokok pemerintah menurut PP 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1) Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut.

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
- c) Tepat waktu.
- d) Lengkap.

2) Andal

Andal dalam laporan keuangan berarti informasi yang terkandung didalamnya terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut.

- a) Penyajian Jujur.
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*).
- c) Netralitas.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Penelitian	Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Efektifitas Penerapan SIPKD	X _{1.1.1} -X _{1.5.21}	0,324 - 0,761	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y _{1.1.1} -Y _{1.4.11}	0,338- 0,634	Valid

Sumber: Output *SPSS*

Hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian efektifitas penerapan SIPKD serta kualitas laporan keuangan adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,30 sehingga keseluruhan indikator yang digunakan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya.

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Efektifitas Penerapan SIPKD	0,828	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0.678	Reliabel

Sumber: Output *SPSS*

Hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan seluruh instrumen penelitian dikatakan reliabel dimana keseluruhan instrumen layak

digunakan untuk mengumpulkan data. Nilai keseluruhan *cronbach's alpha* $\geq 0,6$ menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama pada waktu yang berbeda.

Tabel 3.
Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar

Indikator	Kriteria Efektivitas	Persentase (%)
Keamanan Data	Kriteria Efektif (KE)	75
Kecepatan dan Ketepatan Waktu	Kriteria Kurang Efektif (KKE)	63,63
Ketelitian	Kriteria Efektif (KE)	68,18
Variasi Laporan	Kriteria Efektif (KE)	70,45
Relevansi Sistem	Kriteria Efektif (KE)	86,36

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan penilaian masing-masing indikator dapat disimpulkan dari kelima indikator efektivitas penerapan SIPKD, empat indikator berada pada Kriteria Efektif (KE) antara lain Keamanan data (75% responden), Ketelitian (68,18% responden), Variasi laporan (70,45% responden) dan Relevansi Sistem (86,36% responden). Sedangkan untuk indikator kecepatan dan ketepatan waktu berada pada Kriteria Kurang Efektif (KKE) dengan perolehan 63,63% responden.

Untuk mengetahui hasil jawaban responden terhadap penilaian tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar yang dinilai secara total dapat dilihat berikut.

Tabel 4.
Jawaban Responden atas Penilaian Tingkat Efektivitas Penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar Secara Total

Responden	Skor Nilai Total Setiap Indikator					Total Skor
	1	2	3	4	5	
Pemerintah Kota Denpasar	668	474	417	501	523	2583

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

- 1 = indikator keamanan data
- 2 = indikator waktu
- 3 = indikator ketelitian
- 4 = indikator variasi laporan
- 5 = indikator relevansi system

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui termasuk dalam kategori manakah tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar jika dinilai secara total, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$(c) = \frac{a-b}{4} ; (c) = \frac{3696-924}{4} = 693$$

Keterangan:

- (c) = Interval nilai
- a = Skor tertinggi yang mungkin dicapai, yaitu 4 x jumlah pernyataan x jumlah responden
- b = Skor terendah yang mungkin dicapai, yaitu 1 x jumlah pernyataan x jumlah responden

Berdasarkan perhitungan yang telah dipaparkan maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian dapat ditentukan dengan formulasi sebagai berikut.

- (i) Kriteria Sangat Efektif (KSE) = $3003 \leq KSE \leq 3696$
- (ii) Kriteria Efektif (KE) = $2310 \leq KE \leq 3003$
- (iii) Kriteria Kurang Efektif (KKE) = $1617 \leq KKE \leq 2310$
- (iv) Kriteria Tidak Efektif (KTE) = $924 \leq KTE \leq 1617$

Dari Tabel 4 maka dapat ditentukan persentase dari masing-masing kriteria sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Totalskor responden}}{\text{Totalskor tertinggi yang mungkin dicapai}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2583}{3696} \times 100\% = 69,90\%$$

Dari Tabel 4 maka total skor sebesar 2583 yang apabila dibandingkan dengan rentang nilai masing-masing kriteria, skor nilai tersebut termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) dengan besarnya efektivitas penerapan SIPKD secara keseluruhan sebesar 69,90%. Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif (KE).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5.
Uji Asumsi Klasik

Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed)	Heteroskedastisitas Sig. abs. residual
0,894	0,400

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,894 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Efektifitas Penerapan SIPKD memiliki nilai signifikansi (abs. residual) sebesar $0,400 > 0,05$ sehingga data penelitian dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 6.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Nama Variabel	Koefisien Regresi	Sig. t	Konstanta: 9,282 R square : 0,345
Efektifitas Penerapan SIPKD	0,329	0,000	

$$Y = 9,282 + 0,329 (\text{Efektivitas Penerapan SIPKD}) + e$$

Sumber: Output SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya nilai R square adalah sebesar 0,345 ini berarti pengaruh variabel efektivitas penerapan SIPKD terhadap kualitas

laporan keuangan sebesar 34,5 persen dan sisanya 65,5 persen dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Untuk mengetahui pengaruh variabel efektivitas penerapan SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji-t. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan pada variabel efektivitas penerapan SIPKD adalah sebesar Sig. (0,000). Oleh karena nilai $\text{sig } 0,000 < \alpha = 0,025$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti efektivitas penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin efektif penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang akan tercermin nantinya pada opini audit BPK di Pemerintah Kota Denpasar, begitu pun sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Tingkat efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah pada penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah digunakan di Pemerintah Kota Denpasar agar lebih ditingkatkan pada aspek kecepatan dan ketepatan waktu karena berdasarkan perhitungan indikator efektivitas, aspek tersebut berada pada kriteria kurang efektif (KKE). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan jaringan fiber optik, menambah *hardisk* dan memori, serta *upgrade server* agar pengguna dapat mengakses

SIPKD lebih cepat daripada sebelumnya sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang efektif di Pemerintah Kota Denpasar.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang sama pada penelitian berikutnya di lokasi pemerintahan yang berbeda yang telah menggunakan SIPKD di Provinsi Bali seperti Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bali. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas secara umum, untuk pengukuran efektivitas pada sektor publik selanjutnya diharapkan dapat mengukur efektivitas sistem informasi sesuai PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Selain itu, pada penelitian yang akan datang juga diharapkan dapat meneliti tentang penerapan SIPKD kaitannya dengan penerapan SAP berbasis Akrual. Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa paling lambat pada tahun 2015, pemerintah diwajibkan sudah menerapkan SAP berbasis Akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan. Untuk dapat memperkuat penelitian selanjutnya diharapkan peneliti juga dapat mengukur tingkat kualitas laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Bodnar, H. George dan William S. Hopwood (Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, penerjemah). 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanthi, I Gusti Ayu Eka. 2012. Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*. 17(1): 01-08.
- Delanno, Galuh Fajar. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawas Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA*. 1(1).

- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Lamb, R., R.Kling. 2004. Reconceptualizing Users as Social Actors in Information Systems Research, *Jurnal MIS Quarterly*, Vol. 27, No. 2, pp: 197-236.
- Livari, J, and Ervasti, I. 1994. User Information Satisfaction : IS Implementability and Effectiveness. *Information & Management*. Vol. 27. No. 4 pp: 205-220.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Ramezan, majid. 2009. Measuring The Effectiveness of Human Resource Information System In National Iranian Oil Company (An Empirical Assesment). *Iranian Journal of Management Studies*, 2(2): h: 129-145.
- Rantanen, H., et.al. (2007), Performance measurement systems in the Finnish public sector, *International Journal of Public Sector Management*, Vol.20 No.5, pp. 415-433.
- Ratifah, Ita. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
- Sori, Zulkarnain Muhamad. 2009. Accounting Information System (AIS) and Knowledge Management: A Case Study. *American Journal of Scientific Research ISSN 1450-223X Issue 4*, h: 36-44.
- Trisanthi, Nyoman Rahayu. 2011. Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIE ST. Surakarta: Pignatelli.

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat*). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

----- . www.djkd.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2 bulan Agustus tahun 2013.